**ABSTRAK**

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) mengenai otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan hak untuk mengatur dan menguru sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah harus mampu mengelola sumber-sumber keuangan dengan baik dan benar agar penyelenggaran Pemerintahan Daerah mampu berjalan dengan baik, terutama pada Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dialihkan menjadi Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Dengan pengalihan Pajak ini Pemerintah Daerah Kota Makassar diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalu Sektor PBB-P2 ini karena sektor ini memiliki potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penulis tertati untuk mengangkat judul “**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR”.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan, apa kendala yang dialami serta upaya apa saja yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Makassar untuk mengatasi kendala tersebut agar target dapat dicapai dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

Penulisan Laporan Akhir ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan maksud memandu peneliti untuk memotret situasi sosial secara menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan pokok penelitian dan dikaji dengan pendekatan induktif untuk memahami fakta yang telah didapatkan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diamati. Dan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung ke lapangan kepada para wajib pajak.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis serta data yang didapatkan dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan PBB-P2 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya cukup dengan melalui prosedur yang ada melainkan harus menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang dapat mempermudah para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

ABSTRACT

According to Law No. 23 of 2014 article 1 clause (6) on regional autonomy, in which the Regional Government is granted the right to regulate and self-respect the affairs of the Government and the interests of the local community. In the implementation of regional autonomy the Regional Government must be able to manage the financial resources properly and properly so that the implementation of Local Government can run well, especially in the Land and Rural Land and Rural Tax Sector which has been transferred into Local Tax based on Law no. 28 Year 2009. With the transfer of this Tax the Local Government of Makassar City is expected to increase the Original Regional Revenues through the PBB-P2 Sector is because this sector has enormous potential if managed properly. Therefore, the authors emphasize to elevate the title **OPTIMIZATION OF TAXATION OF THE EARTH and RURAL and URBAN BUILIDINGS BY REGIONAL REVENUE AGENCIES IN ORDER TO INCREASE LOCAL REVENUE IN THE CITY OF MAKASSAR"**. This study aims to find out how the mechanism of collection, what constraints are experienced and what efforts are made by BAPENDA Makassar City to overcome these obstacles so that targets can be achieved and able to increase the original income in the city of Makassar.

The writing of this Final Report uses explorative research method with the aim of guiding the researcher to photograph the social situation thoroughly and deeply about the phenomena that occur in the field related to the subject of research and studied with inductive approach to understand the facts that have been obtained to build a comprehensive understanding of the problem observed. And for data collection techniques authors use interviewing techniques, documentation, as well as direct observation to the field to the taxpayers.

Based on the observations and research authors and data obtained in the field can be concluded that in the collection of PBB-P2 to increase the original income not only through the procedure but there must create a variety of innovations that can facilitate the taxpayers to pay taxes in order to achieve target set.